



ANALISIS TINGKAT KEKUMUHAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI DESA PILOLIYANGA KABUPATEN BOALEMO KOTA GORONTALO

Faridah¹, Suleman Rauf²

Universitas Ichsan Gorontalo^{1,2}

faridahajah52@gmail.com¹, sulemanrauf97@gmail.com²

Informasi Naskah:

Diterima:

4 Maret 2024

Direvisi:

26 April 2024

Disetujui terbit:

30 April 2024

Diterbitkan:

Online

01 Mei 2024

Abstract: Boalemo Regency is one of the regencies in Gorontalo Province. The southern part of Boalemo Regency directly borders Tomini Bay. Boalemo Regency, as a center for trade and services, with population growth continuing to increase and migration increasing, has resulted in people building residences that are not in accordance with the Regional Spatial Plan and do not comply with standards, causing the problem of the growth of slum settlements. The aim of this research is to identify aspects of slums based on 7 physical conditions that support light slums, medium slums and heavy slums and to analyze the level of slums in slum settlements in Piloliyanga Village, especially in 5 research locations, namely Hamlet I, II, III, IV and V using 7 physical aspects of slums, namely building conditions, environmental road conditions, drinking water supply conditions, environmental drainage conditions, waste management conditions, waste management conditions and fire protection conditions. The methods used in this research are descriptive analysis methods and quantitative analysis methods using scoring or weighting. The results of the research after analysis based on 7 physical aspects showed that the slum conditions contained 5 areas which were classified as light slums and 1 area which was classified as moderate slums.

Keyword: Piloliyaga, residential, housing, area, slum

Abstrak: Kabupaten Boalemo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Gorontalo. Bagian Selatan Kabupaten Boalemo berbatasan langsung dengan Teluk Tomini. Kabupaten Boalemo sebagai pusat perdagangan dan jasa dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan migrasi semakin meningkat mengakibatkan masyarakat membangun tempat tinggal yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak sesuai dengan standar sehingga menyebabkan permasalahan tumbuhnya permukiman kumuh. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi aspek-aspek kekumuhan berdasarkan 7 kondisi fisik yang mendukung kumuh ringan, kumuh sedang dan kumuh berat dan menganalisis tingkatan kekumuhan pada permukiman kumuh yang ada di Desa Piloliyanga khususnya pada 5 lokasi penelitian yaitu Dusun I, II, III, IV dan V dengan menggunakan 7 aspek fisik kekumuhan yaitu kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan limbah, kondisi pengelolaan persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif dan metode analisis kuantitatif dengan menggunakan skoring atau pembobotan. Hasil dari penelitian setelah dilakukan analisis berdasarkan 7 aspek fisik didapatkan bahwa kondisi kekumuhan terdapat 5 kawasan yang termasuk kumuh ringan dan 1 kawasan termasuk kumuh sedang.

Kata Kunci: piloliyaga, kawasan, perumahan, permukiman, kekumuhan

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang dengan kondisi demografi yang tidak stabil tercermin pada

angka pertumbuhan penduduk yang tak terkendali. Parahnya jumlah penduduk yang cukup besar tidak dibarengi dengan perbaikan dan pertumbuhan

ekonomi yang baik. Kondisi perekonomian yang morat-marit semakin menambah angka kemiskinan di Indonesia yang berdampak pada degradasi kondisi fisik dan non fisik kehidupan dan penghidupan masyarakat yang secara nyata dan jelas tercermin pada menurunnya kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakatnya.

Dari 2 (dua) hal pokok inilah, yakni : angka pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan kondisi perekonomian yang buruk, terjadilah apa yang disebut dengan permasalahan perumahan dan permukiman bahkan yang paling buruk adalah terbentuknya permukiman kumuh atau kawasan kumuh.

Permasalahan permukiman kumuh perkotaan sering kali menjadi salah satu isu utama yang cukup menjadi polemik, sehingga seperti tidak pernah terkejar oleh upaya penanganan yang dari waktu ke waktu sudah dilakukan. Secara khusus dampak permukiman kumuh juga akan menimbulkan paradigma buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan dampak citra negatif akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan hidup dan penghidupan warganya.

Di lain sisi di bidang tatanan sosial budaya kemasyarakatan, komunitas yang bermukim di lingkungan permukiman kumuh secara ekonomi pada umumnya termasuk golongan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah yang seringkali menjadi alasan penyebab terjadinya degradasi kedisiplinan dan ketidaktertiban dalam berbagai tatanan sosial masyarakat.

Kabupaten Boalemo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Gorontalo. Bagian Selatan Kabupaten Boalemo berbatasan langsung dengan Teluk Tomini. Secara administratif, daerah ini terbagimenjadi 7 (tujuh) Kecamatan yaitu Kecamatan Dulupi, Kecamatan Tilamuta, Kecamatan Botumoito, Kecamatan Mananggu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kekumuhan pada permukiman kumuh yang telah teridentifikasi di Kabupaten Boalemo tepatnya desa piloliyanga dengan mengambil lokasi terparah yang berada di di kabupaten boalemo yaitu desa Piloliyanga yang tersebar di 5 dusun di lokasi kekumuhan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi aspek-aspek kekumuhan berdasarkan 7 kondisi fisik yang mendukung kumuh ringan, kumuh sedang dan kumuh berat dan menganalisis tingkatan kekumuhan pada permukiman kumuh yang ada di Desa Piloliyanga

khususnya pada 5 Kawasan penelitian yang telah teridentifikasi kumuh berdasarkan 7 indikator fisik.

TINJUAN PUSTAKA

Pengertian Permukiman

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan.

Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.

Pengertian Permukiman Kumuh

Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Ciri-ciri Permukiman Kumuh

Menurut Socki (1993) dalam buku Mohammad Gamal Rindarjono (2012): 27 Permukiman kumuh dapat diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri fisik bangunan dan lingkungan permukiman maupun ciri-ciri sosial ekonomi dan budayanya.

Kriteria Permukiman Kumuh

Menurut PERMEN PUPR NO.2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yaitu kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:

1. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Bangunan Gedung
2. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Jalan Lingkungan
3. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Drainase Lingkungan
4. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Pengelolaan Air Limbah
5. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Penyediaan Air Minum
6. Kriteria Kekumuhan Ditinjau Dari Pengelolaan Persampahan

7. Kriteria Kekumuhan Ditinjau Dari Proteksi Kebakaran.

METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh pengambilan 5 kawasan Diarahkan sebagai kawasan pengembangan perdagangan dan jasa berada pada pusat kota dalam kawasan strategis Kabupaten (PKW), Enam lokasi yang akan diklasifikasi di Di desa piloliyanga yaitu Dusun 1, Dusun 2, DUSUN 3, Dusun 4 dan Dusun 5.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan mewawancarai masyarakat pada wilayah penelitian untuk memenuhi penilaian data skoring agar mempermudah klasifikasi permukiman kumuh mengenai 7 kriteria kondisi kekumuhan berdasarkan kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan limbah, kondisi pengelolaan persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui survei ke beberapa instansi yang terkait dan studi literatur untuk melengkapi kelengkapan data yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Jenis penelitian yang digunakan merupakan metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan kondisi yang ada di lapangan dengan mengacu pada variabel dan indikator. Selanjutnya setelah dideskriptifkan lalu dianalisis menggunakan teknik metode kuantitatif dengan menggunakan skoring atau pembobotan.

Untuk mendapatkan klasifikasi tingkat kekumuhan dan urutan tingkat kekumuhan sistem pembobotan berdasarkan hasil penilaian terhadap 7 aspek dapat dilakukan dengan cara. Penilaian dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi terhadap aspek kondisi kekumuhan.

Sistem pembobotan dilakukan sebagai berikut:
Nilai dibagi menjadi 3 tingkatan

- a. 1% - 33% mendapat bobot 1 (rendah)
- b. 34% - 66% mendapat bobot 3 (sedang)
- c. 67% - 100% mendapat bobot 5 (berat)

Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi merupakan:






- a. Kumuh berat bila memiliki nilai 71-95;
- b. Kumuh sedang bila memiliki nilai 45-70;
- c. Kumuh ringan bila memiliki nilai 19-44.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

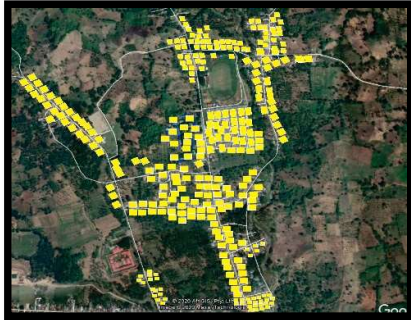
Kondisi Bangunan Gedung

1. Ketidakteraturan bangunan

Tabel 1. Ketidakteraturan bangunan

NO.	KAWASAN	FOTO	PENJELASAN
1.	Dusun 1		Pada bentuk bangunan berbeda-beda dan tidak sama pada setiap bangunannya, rata-rata bangunan pada permukiman memiliki 1 lantai dan ada beberapa bangunan memiliki 2 lantai
2.	Dusun 2		Keteraturan bangunan dapat dilihat pada perumahan formal, dimana orientasi umumnya menghadap jalan, ukuran bangunan dan lahan walaupun berbeda-beda tetapi memiliki pola tipe yang jelas serta bentuk bangunan, dan walaupun tampak berbeda-beda tetapi memiliki keteraturan pola tertentu.
3.	Dusun 3		Dapat dilihat bahwa banyak rumah yang tidak beraturan penempatannya sehingga terlihat tidak teratur
4.	Dusun 4		Masih banyak bangunan yang tidak layak huni dikarenakan dindingnya sebagian rumahnya beton dan sebagian papan.
5.	Dusun 5		Masih banyak bangunan yang tidak layak huni dikarenakan dindingnya

			memakai kayu rumbia mudah di lapuk dan terkesan kumuh dan keteraturan rumah-rumahnya tidak sesuai.
--	--	--	--



Gambar 3. Peta ketidak teraturan bangunan desa Piloliyanga

2. Tingkat kepadatan bangunan

Tabel 2. Kepadatan Bangunan

No	Kawasa n	Jumlah Banguna n (Unit)	LuasAre a (ha)	Kepadata n (Unit/ha)
1.	Dusun 1	132	7,5	17,6
2.	Dusun 2	138	8	17,25
3.	Dusun 3	260	29	8.10
4.	Dusun 4	185	11	16,8
5.	Dusun 5	110	8	13,75



Gambar 2. Peta Kepadatan Bangunan Desa Piloliyanga

3. Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis

Pada indicator ketidak sesuaian dengan persyaratan teknis, penulis akan menganalisis berdasarkan klasifikasi permanensi bangunan.

Tabel 3. Permanensi Bangunan

No	Kawasa n	Jumla h Banguna n Keseluru han	Jumlah Permanensi Bangunan			Presemtase Permanensi Bangunan		
			Per man en	Sem i Per man en	Dar urat	Perma nen	Sem i Per man en	Darur at
1.	Dusun 1	132	104	11	17	78,78	8,33	12,87
2.	Dusun 2	138	113	11	14	81,88	7,1	10,14
3.	Dusun 3	260	229	17	14	88	6,53	5,38
4.	Dusun 4	185	142	29	14	76,75	15,6 7	7,56
5.	Dusun 5	110	80	15	15	72,72	13,6 3	13,63

Kondisi Jalan Lingkungan

1. Cakupan Jalan Lingkungan

Pada cakupan jalan lingkungan yang berada di Dusun kawasan permukiman kumuh di Desa Piloliyanga sebagian sudah terlayani akses jalan lingkungan. Jalan lingkungan yang berada pada 5 Dusun kawasan berupa jalan aspal, jalan beton, jalan paving. Permukiman yang tidak memiliki akses jalan yakni permukiman yang berada di belakang bangunan lain tetapi untuk akses penjalan kaki atau kendaraan roda dua masih bisa dijangkau.

2. Kualitas permukaan jalan

Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan ringan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman.



Gambar 3. Kondisi Jalan Kerikil dan Jalan Aspal

Kondisi Penyediaan Air Minum

Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas:

- Tidak berwarna, sumber air berasal dari sumur dan ada beberapa sumur yang memiliki warna karena tercemar oleh limbah yang ada pada bangunan perdagangan dan jasa karena pada

beberapa kawasan merupakan dataran rendah dan berada dekat dengan laut.

- tidak berbau, sumber air berasal dari sumur dan ada beberapa sumur yang memiliki bau karena tercemar oleh limbah yang ada pada bangunan perdagangan dan jasa yang berdekatan dengan beberapa kawasan.
- Tidak berasa, sumber air berasal dari sumur dan ada beberapa sumur yang memiliki warna karena tercemar oleh limbah yang adapada bangunan perdagangan dan jasa.

Pada 5 Dusun ini masyarakat setempat sebagian besar menggunakan air galon untuk dikonsumsi, ada juga yang menggunakan air PAM yang dimasak.

Kondisi Drainase Lingkungan

1. Ketidak mampuan mengalirkan limpasan air

Masih banyak loaksi yang Jaringan drainase lingkungannya tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan. Pada beberapa kawasan terjadi genangan pada drainase yang kecil sehinggadrainase tidak mampu menampung air, drainase yang rusak sehingga air meluap keluar, drainase yang tidak tersedia dan drainase yang dipenuhi sampah sehingga drainase tidak dapat menampung aliran air yang melebihi drainase dan biasa terjadi pada saat hujan, yang terkena genangan terdapat pada beberapa tempat dengan jumlah yang tidak terlalu besar.

2. Ketidakterersediaan drainase

Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan perumahan atau permukiman, yaitu saluran tersier dan/atau saluran lokal.

Pada 5 lokasi drainase sudah tersedia untuk drainase tersier mengikuti jalan lingkungan dan mengalir menuju laut sedangkan untuk saluran lokal pada beberapa tempat sudah tersedia tapi pada permukiman padat penduduk masih kurang untuk saluran drainase lokalnya.

3. Ketidakterhubungan dengan system drainase perkotaan

Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan saluran pada hierarki diatasnya sehingga menyebabkan air

tidakdapat mengalir dan menimbulkan genangan.

Menurut hasil observasi pada indikator ketidakterhubungan dengan drainase perkotaan terjadi karena pada beberapa tempat belum tersedia konstruksi drainase dengan sehingga terjadi genangan dan air yang mengalir tidak sampai pada pembuangan drainase akhir yang semestinya.

Ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan keterhubungan drainase tersier dan sekunder dan kemana pembuangan terakhir saluran drainase perkotaan. Pada peta saluran drainase dapat dilihat jalan yang tidak terdapat saluran drainase itulah yang kadang saat hujan atau air dari saluran drainase diatasnya mengalir terjadi genangan air.

4. Tidak terpeliharanya drainase

Tidak dilaksanakannya pemeliharaan saluran drainase lingkunganpada lokasi perumahan atau permukiman, baik:

- Pemeliharaan rutin, pemeliharaan rutin dilakukan oleh masyarakat yang didepan rumahnya memiliki saluran drainase sehingga mereka membersihkan dan menjaganya.
- Pemeliharaan berkala, pemeliharaan berkala dilakukan oleh masyarakat dengan cara gotong royong.

Pemeliharaan rutin kadang dilakukan oleh perorangan dan atau gotong royong saat kerja bakti bersama dilingkungan, masih terdapat banyak sampah dibeberapa tempat.

5. Kualitas konstruksi drainase

Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan.

Pada beberapa kawasan terdapat kondisi berupa galian tanah tanpa material pelapis dan terdapat konstruksi drainase yang rusak dan kotor dipenuhi oleh sampah. Kualitas konstruksi drainase buruk berupa konstruksi drainase yang rusak dan belum diperbaiki, penutup drainase tertutup yang tidak lengkap dan rusak yang belum diperbaiki.



Gambar 4. Kondisi Drainase

Kondisi Pengelolaan Limbah

Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.

Pada permukiman biasa yang berada di daratan sudah cukup baik dan setiap rumah telah memiliki kloset yang terhubung ke septic tank pada masing-masing rumah dan pada bangunan yang belum memiliki WC telah dibangun WC umum pada beberapa tempat.

Pada kawasan yang permukimannya berada di atas air mereka tidak memiliki septic tank dan kloset yang mereka miliki termasuk dalam WC.



Gambar 5. –Kondisi pengelolaan limbah dan Mck Umum

Kondisi Pengelolaan Persampahan

1. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai standar teknis

Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu:

- a. Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga, pada 5 kawasan tidak memiliki tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga.
- b. Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan, pada 5 kawasan sudah memiliki TPS tetapi belum memiliki TPS3R, masyarakat yang ada membuang sampah dengan cara ditumpuk lalu dibakar pada masing-masing rumah, dibuang pada TPS yang berada di kawasan masing-masing

atau dibuang pada TPS yang berada pada kawasan lainnya.

- c. Gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan, pada beberapa kawasan sudah tersedia mobil sampah dan gerobak sampah.
 - d. Tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan, pada kawasan tersebut belum tersedia tempat pengelolaan sampah terpadu.
2. Sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai standar teknis

Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Pewadahan dan pemilahan domestik, menurut observasi lapangan penulis dan hasil wawancara tidak adanya pewadahan dan pemilahan persampahan. Sampah rumah tangga pada masing-masing rumah ada yang di bakar dan ada juga masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan langsung dibuang ke laut.
- Pengumpulan lingkungan, belum tersedia tempat pengumpulan sampah lingkungan dan masing-masing masyarakat membuang sampahnya sendiri.
- Pengangkutan lingkungan, sudah tersedia pengangkutan sampah skala lingkungan dengan menggunakan truk sampah tapi truk sampah hanya diparkirkan dan masyarakat yang datang membuang sampah di truk sampah lalu diangkat dan dibuang pada TPA.
- Pengolahan lingkungan, belum tersedia pengelolaan sampah skala lingkungan.



Gambar 6. –tempat pengelolaan sampah

Kondisi Proteksi Kebakaran

1. Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran
Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu:

- a. Jalan lingkungan, pada Desa Piloliyanga sebagian jalan lingkungan sudah tersedia tetapi jalan tersebut hanya dapat diakses oleh kendaraan roda dua karena jalan tersebut sempit dan berada pada permukiman padat bangunan yang tidak bisa diakses oleh mobil pemadam kebakaran.
- b. Sarana komunikasi, pada Desa Piloliyanga penggunaan sarana komunikasi hanya mengandalkan perorangan atau RT/RW setempat karena pada kawasan ini belum memiliki sarana komunikasi lingkungan.
 - c. Data system proteksi kebakaran lingkungan, pada Desa Piloliyanga sebagian belum memiliki data sistem proteksi kebakaran lingkungan.
 - d. Bangunan pos kebakaran, pada Desa Piloliyanga belum memiliki bangunan pos kebakaran lingkungan.
2. Ketidakterediaan prasarana proteksi kebakaran

Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu:

- Alat Pemadam Api Ringan (APAR), pada Desa Piloliyanga belum tersedia alat pemadam api ringan.
- Mobil pompa, pada Desa Piloliyanga belum tersedia mobil pompa tetapi telah tersedia mobil pompa yang tersedia dalam skala kabupaten/kota.
- Mobil tangga sesuai kebutuhan, pada Desa Piloliyanga belum tersedia mobil tangga sesuai kebutuhan tetapi telah tersedia mobil tangga sesuai kebutuhan yang tersedia dalam skala kabupaten/kota.
- Peralatan pendukung lainnya, pada Desa Piloliyanga belum tersedia peralatan pendukung lainnya pada skala lingkungan.



Gambar 7. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

Penilaian Tingkat Kekumuhan

Tabel 4. Hasil Pembobotan Tingkat Kekumuhan 5 Dusun

No	Variabel	Bobot PerKawasan					Total Variabel
		Dusun 1	Dusun 2	Dusun 3	Dusun 4	Dusun 5	
1.	Kondisi Bangunan Gedung	1	3	5	3	1	13,3
		1	3	5	3	3	
		3	3	5	1	1	
2.	Kondisi Jalan Lingkungan	1	3	5	3	3	15
		1	3	5	3	3	
3.	Kondisi Penyediaan Air Minum	1	1	3	1	1	7
		1	1	3	1	1	
4.	Kondisi Drainase Lingkungan	1	1	1	1	1	7,6
		1	1	3	1	1	
		1	1	5	3	1	
5.	Kondisi Pengelolaan Limbah	1	1	3	1	1	6,5
		1	1	2	1	1	
6.	Kondisi Pengelolaan sampah	1	1	1	1	1	5,3
		1	1	2	1	1	
		1	1	1	1	1	
7.	Kondisi Proteksi Kebakaran	3	3	3	3	3	11,5
		2	1	3	1	1	
Jumlah		22	29	55	29	25	32

Berdasarkan tabel hasil pembobotan tingkat kekumuhan 5 kawasan penelitian dapat dilihat pada 5 kawasan berdasarkan pembobotan diurutkan berdasarkan nilai yang paling tinggi yaitu Kawasan Dusun 3 dengan nilai pembobotan 55, Kawasan Dusun 1 dengan nilai pembobotan 22 Dusun 2 dan 4 dengan nilai pembobotan 29, Kawasan Dusun 5 dengan nilai pembobotan 25. Pada 5 Kawasan dengan 7 variabel mendapat nilai variabel total 32.

Berdasarkan hasil analisis dengan melihat variabel dan indikator yang telah dianalisis Pada 5 kawasan permukiman kumuh variabel proteksi kebakaran mendapatkan nilai tertinggi yaitu kondisi drainase lingkungan karena pada 5 kawasan tersebut kondisi drainasenyamengalami penurunan fungsi yakni drainase pada 5 kawasan tersebut sudah tidak dapat lagi mengalirkan air limpasan secara maksimal.

Selanjutnya kondisi ke dua pada variabel dan indikator terdapat pada variabel kondisi pengelolaan persampahan yaitu pada prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis, sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai standar teknis dan tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan karena pada 5 kawasan tersebut mereka tidak memperhatikan kemana sampah yang mereka buang dan tidak tersedianya TPS pada tiap lingkungan.

Selanjutnya kondisi ketiga pada variabel dan indikator terdapat pada variabel kondisi bangunan gedung yaitu pada ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan, ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan karena pada 5 kawasan tersebut bangunan tidak teratur dan masih belum memenuhi persyaratan teknis.

Untuk mendapatkan klasifikasi tingkat kekumuhan dan daftar urutan (rangking) tingkat permukiman kumuh berdasarkan hasil penilaian terhadap kompleks permasalahan.

Penilaian dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi terhadap aspek.

Berdasarkan Kondisi Kekumuhan, suatu lokasi merupakan:

- a. Kumuh berat bila memiliki nilai 71-95;
- b. Kumuh sedang bila memiliki nilai 45-70;
- c. Kumuh ringan bila memiliki nilai 19-44.

Tabel 5. Hasil Pembobotan Tingkat Kekumuhan 5 Dusun

No	Nama	Bobot	Kriteria
1.	Dusun 1	22	Ringan
2.	Dusun 2	29	Ringan
3.	Dusun 3	55	Sedang
4.	Dusun 4	29	Ringan
5.	Dusun 5	25	Ringan
Total		160 :5 = 32	Ringan dan sedang

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa 5 kawasan kumuh yang ada di Desa Piloliyanga yang termasuk kumuh ringan yaitu dusun 1,2,3 dan dusun 3 termasuk kumuh sedang.

Berdasarkan 7 indikator tingkat kekumuhan

peneliti akan mengurutkan kondisi berat sampai ringan berdasarkan indikator kekumuhan yakni:

1. Kondisi Jalan Lingkungan
2. Kondisi Bangunan Gedung
3. Kondisi Proteksi Kebakaran
4. Kondisi Drainase Lingkungan
5. Kondisi Penyediaan Air Minum
6. Kondisi Pengelolaan Limbah
7. Kondisi Pengelolaan Persampahan

Berdasarkan hasil karakteristik kekumuhan dan penilaian lokasi pada perumahan dan permukiman kumuh di Desa piloliyanga dusun 1,2,3,4 dan 5, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kawasan Dusun 1, dusun 2, dusun 4, dan dusun 5 termasuk kumuh ringan sedangkan dusun 3 termasuk kumuh sedang dan memiliki karakteristik kekumuhan yaitu:
 - a. Bangunan gedung di kawasan Desa Piloliyanga masih banyak yang bersifat semi permanen yaitu dengan dinding setengah batu bata dan setengah lagi terbuat dari bahan kayu ataupun dari dinding bambu. Hasil yang didapat dari identifikasi yaitu; masih banyak bangunan yang tidak layak huni, bangunan tidak memiliki keteraturan dan tingkat kepadatan bangunan tidak sesuai ketentuan.
 - b. Infrastruktur yang masih kurang memadai dan belum sesuai standar seperti jalan lingkungan yang ada des piloliyanga ini sebagian jalannya belum menggunakan prkerasan, sebagian wilayah belum memiliki drainase lingkungan dan setiap wilayah belum memiliki drainase lingkungan. Pengolahan air limbah yang belum sesuai standar, beberpa unit rumah tidak memiliki mck pribadi.
2. Langkah strategis pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh kabupaten Boalemo Desa piloliyanga dalam hal ini kawasan kumuh Dusun 1,2,3,4 dan 5 dapat dilakukan melalui kegiatan seperti:
 - a. Strategi pencegahan dengan melakukan kegiatan pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian. Pemberdayaan masyarakat dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui Pendampingan dan pelayanan informasi. Pendampingan merupakan kegiatan pelayanan informasi kepada

masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembimbingan, dan bantuan teknis, sedangkan pelayanan informasi merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.

- b. Pengawasan dan pengendalian merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk memastikan apakah tujuan organisasi. Apabila terjadi penyimpangan dimana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap:

1. Perizinan;
2. Standar teknis;
3. Kelayakan fungsi.

- c. Strategi peningkatan kualitas dengan melakukan beberapa kegiatan seperti: permukiman kembali dan peremajaan. Permukiman kembali dilakukan pada bangunan gedung/rumah tinggal yang tidak memiliki legalitas/ilegal dan tidak layak huni.

Permukiman kembali dilakukan dengan memindahkan masyarakat yang terkena dampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.

Peremajaan dilakukan pada bangunan gedung yang tidak layak huni tetapi memiliki legalitas/legal, dan juga untuk infrastruktur yang ada di kawasan Desa Piloliyanga yang masih kurang memadai atau tidak sesuai standar, seperti: jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengolahan air limbah, pengolahan sampah dan sistem proteksi kebakaran.

Peremajaan akan dilakukan melalui perbaikan, penambahan /pembangunan, pembongkaran dan penataan rumah, sarana, prasarana, dan utilitas umum yang belum memenuhi syarat dan tidak sesuai standar.

PENANGANAN

Adapun penanganan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemukiman di desa Piloliyanga :

1. **Bagunan Gedung**
 - a) Peningkatan kualitas lingkungan melalui penataan bangunan
 - b) Pengendalian dan pembatasan perkembangan permukiman
 - c) Rehabilitasi bangunan gedung sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat
2. **Jalan Lingkungan**
 - a) Peningkatan aksesibilitas kawasan melalui pembangunan jalan lingkungan baru,
 - b) Pengintegrasian jaringan jalan lingkungan dan peningkatan kualitas jalan lingkungan
3. **Pengelolaan Sampah**
 - a) Peniadaan sampah skala lingkungan dengan pembakaran tanpa asap
 - b) Peningkatan tingkat layanan pengangkutan sampah ketempat pengolahan sampah
 - c) Pencegahan pembuangan sampah kesaluran drainase
 - d) Peningkatan tingkat pelayanan dan ketersediaan sarana pengolahan sampah
4. **Drainase Lingkungan**
 - a) Peningkatan sistem dan jaringan drainase kawasan yang berjenjang untuk meminimalisir potensi genangan
 - b) Peningkatan tingkat pelayanan dan ketersediaan jaringan drainase
 - c) Perbaikan jaringan drainase lingkungan
 - d) Pembangunan baru jaringan drainase lingkungan sesuai kaidah dan standar teknis
 - e) Konektifitas sistem jaringan drainase yang berjenjang
5. **Air Bersih**
 - a) Peningkatan tingkat pelayanan dan ketersediaan air bersih
 - b) Pembangunan sarana penyediaan air bersih skala lingkungan
 - c) Peningkatan akses air bersih secara swadaya masyarakat
6. **Jamban/mck**
 - a) Pemisahan saluran limbah dengan saluran drainase
 - b) Peningkatan tingkat pelayanan dan ketersediaan sarana pengelolaan air limbah

- c) Pembangunan sarana pengelolaan air limbah secara komunal dalam skala lingkungan
7. Proteksi Kebakaran
Perlu adanya peningkatan dan penyediaan system proteksi kebakaran dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran.

SARAN

Adapun rekomendasi bagi pemerintah daerah atau peneliti selanjutnya, adalah sebagai berikut :

- a. Perlu adanya penyediaan lahan yang sesuai guna dijadikan tempat tinggal untuk penduduk, sehingga penduduk yang ada tidak membangun rumah dilahan yang tidak diperuntukan untuk didirikan bangunan.
- b. Perlu adanya penertiban lingkungan sehingga masyarakat tidak membuat bangunan liar dan tidak permanen, karena akan menimbulkan permukiman kumuh.
- c. Perlu adanya penyediaan, perbaikan dan pembersihan saluran air/ drainase dari sampah dan sedimentasi, guna menanggulangi meluapnya air ke jalanan.
- d. Perlunya menjaga kebersihan sanitasi lingkungan dalam hal ini adalah MCK umum agar terhindar dari penyakit.
- e. Pembangunan/penyediaan tempat pengolahan sampah dan pembangunan jalan lingkungan untuk area yang belum memiliki jalan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonimus, 2016. *Rencana Pencegahan dan Peingkatan Kualitas Permukiman*

Kumuh Perkotaan (RP2KPKP). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Anonimus, 2017, Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Boalemo Tahun 2017 – 2022.

Anonimus, 2016, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Jakarta.

Anonimus, 2011, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta.

Fitria Niken. 2014. Identifikasi Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat. Skripsi. Jakarta: Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Institut Teknologi Sepuluh November.

Suci Wiarni, Windy Mononimbar & Suryadi Supardjo. 2018. *Analisis Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Di Kecamatan Kotamobagu Timur*. Jurnal Spasial Vol.5 No.1. Universitas Sam Ratulangi Manado.

Profil Kabupaten Boalemo
<https://www.gorontaloprov.go.id/profil/kabupaten-kota/kabupaten-boalemo>

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No 6 Tahun 2017